



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS DWI SUTİYONO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 429805

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/85 m2 di KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/85 m2 di KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.800.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA XENIA TYPE X Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
4. LAINNYA, GENIO SEPEDA LIPAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000
5. LAINNYA, POLYGON CASCADE 3 Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
6. LAINNYA, UNITED UNITED Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
7. LAINNYA, UNITED UNITED Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
1.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 103.917.247

F. HARTA LAINNYA Rp. ---



Sub Total	Rp.	905.217.247
III. HUTANG	Rp.	43.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	862.217.247

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.